

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 131 | Tahun XXXIV | November-Desember 2017



**Ramai-Ramai
Garap Fintech**

**LTV Spasial
Masih Dalam
Kajian**

**Efisiensi hingga
Digitalisasi
Menjadi Kunci**

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Manfaatkan Momentum dan Bersiap Hadapi Tantangan



Perekonomian Indonesia terus membaik, walau pertumbuhannya dinilai masih melambat. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2017 diprediksi lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Jika pada 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,02%, pada akhir 2017 diproyeksikan mencapai angka 5,17%, meski dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan (APBNP) 2017 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,20%.

Begitu pun dengan kondisi perekonomian pada 2018. Sebagian besar pengamat menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 diprediksi lebih baik dibandingkan dengan 2017. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,30%.

Sedangkan, pemerintah dalam Rancangan APBN 2018 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan daya beli masyarakat, konsumsi pemerintah yang lebih produktif dan tepat sasaran, pembangunan infrastruktur melalui kredit investasi, investasi langsung, serta peningkatan ekspor dan impor.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya pada acara “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia”, akhir November lalu, menyatakan pentingnya memanfaatkan momentum dalam pengambilan kebijakan. Joko Widodo menilai, saat ini kita berada dalam situasi *new normal*. Seiring dengan hal itu, muncul berbagai model bisnis baru yang mengubah pola konsumsi masyarakat, seperti dari belanja ke wisata. Berbagai perubahan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Artinya, sektor usaha atau industri harus bisa memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang ada. Demikian pula dengan sektor perbankan.

Industri perbankan harus bisa memanfaatkan perbaikan ekonomi yang terjadi saat ini untuk mendorong pertumbuhan bisnis bank. Selain itu, para pelaku usaha di sektor ini harus bersiap diri menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman, terutama terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi dan era disruptif yang tengah berlangsung saat ini.

Salah satu tantangan yang mesti dihadapi pelaku perbankan ialah kehadiran perusahaan-perusahaan rintisan (*start up*) atau *financial technology* (*fintech*). Bagi beberapa bank, tantangan itu justru menjadi berkah. Berbagai jalan pun mereka tempuh, mulai dari berkolaborasi dengan perusahaan *fintech* hingga melakukan akuisisi anak perusahaan untuk menjalankan bisnis *fintech*. *Fintech* dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk melakukan penetrasi yang lebih dalam, terutama bagi masyarakat yang masih belum terjangkau bank (*unbanked*).

Di samping itu, tentu saja bank juga harus terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan nasabah. Juga, tetap teguh menjalankan prinsip *prudential banking*, mengingat ketidakpastian ekonomi masih berlangsung. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Efisiensi hingga Digitalisasi Menjadi Kunci3
 Tahun 2017 menjadi titik balik industri perbankan untuk mulai mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi ke depan. Meski belum sepenuhnya pulih, kondisi perbankan yang membaik diyakini para pelaku industri akan terus berlanjut pada 2018.



Optimisme Bankir pada 20186

Tantangan pada Tahun Politik8
 Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan membaik pada 2018. Kendati demikian, pesta politik berupa pilkada serentak dinilai menjadi tantangan tersendiri.

Targetkan Pertumbuhan Moderat9

Aktualita

Menajamkan Integrasi Perbankan10

ASEAN Banking Council Meeting Ke-4711

Membuat Terang Perpajakan bagi Perbankan12
 Kebijakan perpajakan yang bersinggungan dengan sektor perbankan masih menimbulkan pertanyaan bagi pengelola sektor ini. Melalui “*CEO Breakfast Meeting*”, Perbanas ingin memberikan gambaran yang jelas tentang hal tersebut kepada pelaku bisnis perbankan.



CEO Breakfast Meeting Bahas Kebijakan Fiskal13

Ramai-Ramai Garap Fintech14

Era disruptif mendorong persaingan makin ketat dan melebar dengan hadirnya pendatang baru bernama *fintech*. Bagi perbankan, itu bukanlah masalah besar karena kini bank juga ikut serta mengembangkan *fintech*.

Wacana

LTV Spasial Masih dalam Kajian16

Profil

Antonius Ketut Dwirianto,
Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko & Legal Affairs PaninBank

Tumbuh Terbatas di Tengah Tantangan18
 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 diproyeksikan lebih baik ketimbang 2017, walaupun agak sedikit tertahan. Tentunya hal yang sama pun akan berlaku pada industri perbankan.



Sekilas Berita

Perbanas Sumut Berbagi Kasih21

Bakti Sosial Perbanas Jateng22

Perbanas Jateng dan Udinus Jalin Kerja Sama23

Untuk memberikan informasi kepada pencari kerja yang berminat berkarier di sektor perbankan, Udinus bekerja sama dengan Perbanas Jateng menyelenggarakan *job fair*. Selain mendapat informasi lowongan pekerjaan, para pencari kerja juga bisa berkonsultasi mengenai dunia kerja di sektor perbankan.



Sehat dan Solid Ala Perbanas Sulut24

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih - PT Jotun Indonesia17



Efisiensi hingga Digitalisasi Menjadi Kunci

Tahun 2017 menjadi titik balik industri perbankan untuk mulai mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi ke depan. Meski belum sepenuhnya pulih, kondisi perbankan yang membaik diyakini para pelaku industri akan terus berlanjut pada 2018.

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Lihat saja, jika pertumbuhan ekonomi pada 2015 dan 2016 masing-masing tercatat 4,88% dan 5,01%, pada 2017 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,20%. Bahkan, pada 2018 pertumbuhan ekonomi diprediksi akan terus membaik, yakni di angka 5,40%.

Hal itu tentu akan berdampak pada sektor ekonomi di Tanah Air, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu sektor industri yang terkena dampak langsung adalah perbankan. Meski sampai dengan saat ini pertumbuhan

industri perbankan terbilang lebih lambat daripada tahun-tahun sebelumnya, industri ini tetap menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang lebih baik.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 diperkirakan akan membaik pada tingkat 5,4% dengan didukung peningkatan daya beli masyarakat, konsumsi pemerintah yang lebih produktif dan tepat sasaran, pembangunan infrastruktur

melalui kredit investasi, investasi langsung, serta peningkatan ekspor dan impor,” ujarnya saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa waktu lalu.

Dari sisi inflasi, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berupaya menjaga inflasi di kisaran 3,5% (plus minus 1%), lebih rendah daripada target tahun ini yang sebesar 4% (plus minus 1%). Menurut Sri Mulyani, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan.

Sementara itu, menurut Biro Riset Infobank (birI), pada 2017 pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 5,00%-5,20%. Sedangkan, pada 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,10%-5,30%.

Bagaimana dengan industri perbankan? Dibandingkan dengan 2016, pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 diperkirakan lebih tinggi. Industri perbankan juga akan mencatatkan kinerja yang lebih baik dari sisi profitabilitas. Sempat mengalami penurunan laba sebesar 6,76% pada 2015 dan hanya mencatatkan kenaikan sebesar 1,83% pada 2016, kenaikan laba pada 2017 diprediksi akan mencapai dua digit.

Biro Riset Infobank menyebutkan, laba industri perbankan tercatat naik 19,09% pada Juli 2017. Namun, tak semua bank mencatatkan kenaikan laba. Setidaknya, ada 45 bank yang mencatatkan pertumbuhan laba di atas 20% dan 40 bank lainnya labanya tercatat menurun. Bahkan, hingga Juni 2016, ada juga bank yang mencatatkan kerugian.

Tingginya perolehan laba perbankan itu bukan tanpa sebab. Sampai dengan akhir 2017, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan mencapai 7,5%-9,5%, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) diprediksi tumbuh di kisaran 8,5%-11,5%. Sementara, pada 2018 kredit perbankan diperkirakan tumbuh di kisaran 10%-12% dan DPK meningkat di kisaran 12%-14%. *NPL* perbankan juga diprediksi menurun. Namun, masih ada beberapa bank yang harus bekerja keras menuntaskan masalah kredit macetnya karena masih mencatatkan *NPL* sebesar 5% pada akhir Juni 2017.

Selain mengelola *NPL* dengan baik, efisiensi harus dilakukan perbankan agar dapat membukukan pertumbuhan



Luis E. Breuer; berjalan baik

laba yang signifikan pada 2018. Tak hanya itu, konsolidasi juga perlu dilakukan agar kredit bermasalah tidak lagi meningkat. Para bankir pun mesti mengatur strategi dalam menghadapi revolusi digital yang sudah mulai merambah segala lini industri.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri. Pasalnya, selain menjaga kinerja, kualitas aset, dan pelayanan, mereka kini harus bersiap menghadapi revolusi digital yang sangat cepat bergerak dalam beberapa tahun terakhir.

Senada dengan prediksi pemerintah dan Biro Riset Infobank, International Monetary Fund (IMF) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berada di kisaran 5,3%. Pertumbuhan ini akan banyak ditopang oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Luis E. Breuer, Pemimpin Misi IMF untuk Indonesia, mengatakan, permintaan domestik akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan. Namun, peningkatan yang akan terjadi masih tumbuh moderat. “Perekonomian Indonesia terus berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan makro-ekonomi yang hati-hati, peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas, dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing,” ujar Breuer dalam pernyataan tertulisnya.

Breuer menambahkan, pihaknya baru saja selesai melakukan evaluasi terhadap perekonomian Indonesia. Pihaknya juga sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

(BI). Menurut Breuer, terjaganya ekonomi Indonesia ditandai dengan laju inflasi yang terjaga. Tahun ini inflasi diperkirakan sebesar 3,7% (*year on year* atau *yoy*) dan menurun menjadi 3,6% pada 2018.

Sementara itu, transaksi berjalan Indonesia diperkirakan masih defisit 1,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan membengkak menjadi 1,9% dari PDB pada 2018. Namun, IMF menekankan, ada kecenderungan



risiko ekonomi eksternal yang lebih besar karena potensi pembalikan arus modal asing, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Tiongkok, dan risiko keamanan dari stabilitas geopolitik kawasan.

Breuer menyimpulkan, dalam jangka pendek Indonesia harus menyeimbangkan orientasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, tapi pada saat yang sama juga harus menjaga stabilitas perekonomian. “Kebijakan fiskal dirancang secara tepat untuk membangun kembali penyangga fiskal dengan menargetkan penurunan defisit anggaran pada 2018. Anggaran tersebut juga mencakup kebijakan menyeimbangkan kembali anggaran dari subsidi yang tidak ditargetkan dan pengeluaran tidak produktif lainnya terhadap belanja sosial dan investasi,” katanya.

Untuk kebijakan moneter, IMF menyarankan otoritas untuk menjaga stabilitas harga sembari mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Menurut IMF, kebijakan moneter yang diterapkan BI saat ini sudah tepat.

Terkait dengan sistem keuangan Indonesia, IMF menilai, kebijakan yang diberlakukan harus tetap menjaga stabilitas. Sejauh ini, menurut Breuer, sistem perbankan Indonesia terjaga baik dengan profitabilitas perbankan yang tinggi dan likuiditas yang cukup. Rasio *NPL* terjaga, tapi BI dan OJK perlu terus mengawasi pergerakan *NPL*, terutama untuk risiko kredit yang diperinci khusus (*special mention*) dan kredit yang direstrukturisasi. Laporan terbaru Asian

Development Bank (ADB) menyatakan bahwa investasi dan ekspor yang kuat di Indonesia mendukung laju pertumbuhan yang sehat pada paruh pertama 2017.

“Ekonomi Indonesia tetap kuat, terlepas dari ketidakpastian global, dengan pertumbuhan yang diharapkan akan baik pada tahun ini,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia.

Edisi pembaruan dari publikasi ekonomi tahunan Asian Development Outlook (ADO) 2017 mempertahankan perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia yang sebesar 5,1% untuk 2017 dan 5,3% untuk 2018. Disebutkan juga bahwa PDB tumbuh melampaui 5% pada paruh pertama tahun ini, didorong oleh investasi aset tetap dan ekspor bersih.

Winfried Wicklein menambahkan, dengan alokasi yang lebih tinggi untuk infrastruktur publik dan iklim investasi swasta yang makin baik, ekspansi ekonomi Indonesia kemungkinan masih berlanjut hingga tahun depan.

ADO *Update* mencatat bahwa belanja pemerintah diprediksi akan mendorong pertumbuhan pada paruh kedua 2017. Sementara itu, investasi swasta diperkirakan akan meningkat perlahan, seiring dengan mulai terlihatnya dampak positif dari reformasi kebijakan guna memperbaiki iklim usaha. Keputusan Standard & Poor’s baru-baru ini untuk menaikkan peringkat Indonesia ke “layak investasi” atau *investment grade* diharapkan akan mempercepat arus modal masuk, termasuk investasi langsung asing. ■

Kinerja Perbankan Belum Optimal

Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, mengungkapkan, tingkat profitabilitas perbankan terus menurun dalam lima tahun terakhir. Ia menilai, hal itu disebabkan oleh *margin* penyaluran kredit yang terus melemah dan rasio kredit bermasalah yang masih tinggi.

“Dalam lima tahun terakhir bank tidak memiliki kinerja yang optimal atau terlihat profitabilitas melambat. Saat tren suku bunga turun, kredit malah ikut melambat,” ungkapnya.

Menurut Halim, makin ketatnya kompetisi perbankan, ditambah masuknya pemain-pemain di sektor jasa keuangan, seperti industri teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*, juga menjadi penyebab terus menurunnya profitabilitas perbankan. “Saya meyakini, perbankan ke depan akan lebih selektif dalam ekspansi bisnis karena masih menuntaskan konsolidasi bisnis. Perbankan juga harus mengubah strategi bisnis karena pola konsumsi masyarakat sudah berubah,” terangnya.

Menurunnya profitabilitas perbankan terlihat dari penurunan tingkat keuntungan dari *return on assets (ROA)*

perbankan dalam tiga tahun terakhir. Misalnya, untuk bank beraset besar atau bank-bank di kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4, perolehan *ROA* pada Desember 2011 tercatat 4%, kemudian menurun ke rentang 2,5% hingga 3% pada Desember 2016, dan stagnan di kisaran 3% pada September 2017.

“Dari data saya, selain pelemahan kredit, juga sudah terlihat dari 2011. *ROA* terus menurun. Sekarang sulit untuk keseluruhan melebihi 3%,” kata Halim.

Halim juga menyoroti pertumbuhan kredit yang terus melambat. Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pertumbuhan kredit hingga September 2017 tercatat 7,9% atau lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2017 yang mencapai 8,4%. ■



Optimisme Bankir pada 2018

Perekonomian Indonesia pada 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Kinerja perbankan pada 2018 pun diprediksi lebih baik.

Pemerintah terus melakukan perbaikan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Meski perlahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2015 pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 4,88%, perlahan meningkat menjadi 5,01% pada 2016 dan diperkirakan bisa tumbuh 5,20% pada 2017. Sedangkan, pada 2018 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,40%.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi, para pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, memiliki keyakinan bahwa kinerja

perbankan akan lebih baik lagi pada tahun mendatang. Meski demikian, untuk mencapai kinerja yang lebih baik, memang tak mudah, mengingat tantangan yang dihadapi makin kompleks. Mulai dari persaingan yang kian ketat hingga munculnya pelaku usaha baru, seperti perusahaan *start up* atau *financial technology (fintech)*.

Bagaimana pendapat para bankir terkait dengan tantangan industri perbankan pada 2018? Berikut ini pandangan beberapa bankir.

Arifin Indra,

Direktur Utama Bank Yudha Bhakti

Kredit Ditargetkan Tumbuh 26,93%

Pertumbuhan ekonomi pada 2018 diprediksi lebih baik dibandingkan dengan 2017, yakni di kisaran 5,1%-5,5%. Bank Yudha Bhakti pun optimistis kinerja keuangannya pada 2018 akan lebih baik daripada 2017. Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, Arifin Indra, di Jakarta, Kamis, 30 November 2017, mengatakan, pada 2018 perseroan menargetkan kredit tumbuh sebesar 26,93% atau meningkat menjadi Rp5,07 triliun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 24,34% atau menjadi Rp5,12 triliun.

Dengan pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK tersebut, laba sebelum pajak ditargetkan meningkat 71,5% atau menjadi Rp130,26 miliar dan total aset dipatok tumbuh 32,94% menjadi Rp6,51 triliun. Sementara, rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)* dijaga di angka 27,27%, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO) sebesar 83,11%, *loan to funding ratio (LFR)* sebesar 95,12%, dan *non performing loan (NPL) nett* di kisaran 1,10%.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Yudha Bhakti akan melakukan beberapa langkah strategis. Di antaranya, pembukaan kantor cabang di wilayah Jakarta, Pontianak, Malang, Yogyakarta/Solo, dan Purwokerto. Selain itu, membuka 11 kantor kas baru di wilayah *customer based* Bank

Yudha Bhakti. “Juga, relokasi satu kantor cabang utama ke tempat yang lebih strategis dan mendekati *customer based* bank serta penutupan dua kantor cabang pembantu yang dianggap kurang produktif,” jelas Arifin.

Selain itu, Bank Yudha Bhakti akan mengembangkan produk dan layanan. Rencananya, pada tahun mendatang bank ini akan meluncurkan produk tabungan berhadiah, tabungan berjangka, tabungan simpanan khusus pelajar, program kredit perumahan rakyat khusus untuk anggota TNI Polri, serta layanan *short message service (SMS) banking*, peluncuran kartu debit, dan *mobile banking*.

Hingga triwulan ketiga 2017, Bank Yudha Bhakti telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,7 triliun atau tumbuh 25,14% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp3 triliun. Kinerja positif tersebut telah menopang

perolehan laba sebelum pajaknya yang mencapai Rp81,1 miliar atau meningkat 14,5% dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun lalu yang tercatat Rp70,8 miliar.

Sementara itu, hingga akhir September 2017, DPK Bank Yudha Bhakti tercatat Rp3,9 triliun atau meningkat 25,63% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,1 triliun.



Parwati Surjaudaja,
Presiden Direktur Bank OCBC NISP

Optimistis Tumbuh Double Digit

Bank OCBC NISP (OCBC NISP) tak terlalu ambisius meningkatkan pertumbuhan kreditnya tahun ini. Menurunnya permintaan kredit masih menjadi salah satu alasan mendasar. Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, saat jumpa pers di Menara OCBC NISP Jakarta. Parwati mengatakan, permintaan kredit yang belum terlihat membaik menuntut Bank OCBC NISP untuk lebih berhati-hati. Namun, pihaknya optimistis kreditnya tumbuh *double digit* hingga akhir tahun.

“Kami *sih* yakin pertumbuhan kredit antara 10% hingga 15%. Harapannya, hingga akhir (tahun) tetap *segitu*. Karena, hingga September tahun ini, pertumbuhannya sudah sekitar 17%,” ungkapnya.



Sebagai informasi, hingga triwulan ketiga 2017, Bank OCBC NISP mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17% secara tahunan (*year on year/yoy*) atau meningkat menjadi Rp103,34 triliun. Menurut Parwati, Bank OCBC NISP masih fokus untuk menyalurkan kredit secara merata ke segmen ritel dan korporasi hingga tahun depan.

Parwati menilai, segmen tersebut masih terlihat stabil dan sehat. Bank OCBC NISP berhasil mencatatkan peningkatan asetnya, yakni menjadi Rp149,8 triliun atau tumbuh 16% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp129,5 triliun.

Maryono,
Direktur Utama BTN

Konsolidasi dan Mengatur Strategi

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus menjalin kerja sama guna menghadapi digitalisasi layanan keuangan. Menurut Maryono, Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), pihaknya akan terus berkonsolidasi mengatur strategi guna menghadapi persaingan digital. Salah satunya, persaingan dengan *financial technology* (*fintech*).

“Semua bank Himbara telah mempersiapkan strategi digitalisasi. Semuanya sudah mempersiapkan, baik BNI (Bank Negara Indonesia), BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mandiri dan BTN. Sebagai contohnya, ada program pemerintah (terkait dengan) penggunaan uang elektronik untuk tol atau e-Toll itu semua kami sudah siap dan ke depan kami bisa lakukan di produk lain,” ungkap Maryono usai menghadiri *memorandum of understanding (MoU)* Penyediaan Perangkat Electronic Data Capture (EDC) di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin, 20 November 2017.

Selain program e-Toll, pihaknya telah melaksanakan integrasi ATM Link milik Himbara guna mempermudah masyarakat dalam pelayanan transaksi keuangan. Maryono berharap, integrasi *ATM* tersebut dapat menjadi pelopor untuk sinergitas Himbara selanjutnya. “Integrasi *ATM* ini masih bagian kecil. Jadi, nanti ada sinergi langkah selanjutnya yang dilakukan. Misal, saat ini penyediaan *EDC* itu *‘kan* sinergi *IT* (*information technology*), nanti ada yang lain,” jelasnya.

Maryono menilai, selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, adanya sinergitas berdampak pada efisiensi pengeluaran pihak perbankan. “Ada efisiensi, tapi belum bisa kami hitung. Namun, yang kami katakan angka efisiensi, jelas kami lihat hasilnya setelah melakukan sinergi di bank-bank Himbara ini,” terangnya.

Maryono juga mengaku optimistis perbankan nasional dapat meningkatkan angka kreditnya hingga akhir 2017.



Walau terdapat penurunan kredit, lanjutnya, hal itu hanya terjadi di beberapa sektor. Ia memastikan bahwa secara umum kredit perbankan mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Maryono menjelaskan, perbankan, khususnya bank-bank Himbara, saat ini tengah mencoba untuk menurunkan suku bunga kredit. Ia berharap, dalam waktu dekat penurunan suku bunga kredit bank-bank Himbara dapat segera diimplementasikan.

“Hampir semua (bank-bank Himbara) sudah mulai menurunkan (suku bunga kredit). Semoga 2018 turun karena *BI rate* sekarang sudah mulai menurun. Dan, suku bunga empat bank Himbara sudah di bawah 10% secara rata-rata,” jelasnya.

Tantangan pada Tahun Politik

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan membaik pada 2018. Kendati demikian, pesta politik berupa pilkada serentak dinilai menjadi tantangan tersendiri.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2018. Target optimistis tersebut mendapat reaksi dari para pelaku industri, terutama industri jasa keuangan. Sementara itu, para pengamat justru lebih pesimistis terhadap target yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan, pertumbuhan ekonomi memang masih akan terjadi pada 2017 dan 2018. Namun, target pemerintah sebesar 5,4% akan sulit tercapai.

Menurutnya, target realistis untuk pertumbuhan ekonomi pada 2018 ialah sebesar 5,1% sampai dengan 5,2%. Kendati demikian, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa target pemerintah tersebut bisa saja tercapai.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Satu, perpajakan. Harus ada kebijakan yang lebih optimal untuk meningkatkan rasio pajak. Agenda pemerintah dalam hal pajak, seperti penetapan pajak untuk pendidikan, pajak buku, dan pajak kertas, tidak akan mendorong pertumbuhan penerimaan negara.

Dua, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas moneter dan inovasi pembiayaan. Saat ini Indonesia perlu lebih banyak melakukan inovasi pembiayaan karena jumlah pelaku usaha di dalam negeri lebih dari 50 juta.

Tiga, selama ini banyak sekali keinginan yang hendak dicapai pemerintah. Namun, sayangnya di lapangan tidak ada sinergi untuk mencapai keinginan tersebut.

Hendri menilai 2018 makin menantang karena merupakan tahun politik. Pada tahun tersebut akan digelar pilkada serentak dan ada persiapan Pemilu 2019. Berbeda dengan pilkada serentak 2015 yang hanya digelar di delapan provinsi, cakupan pilkada kali ini lebih luas dan meliputi daerah-daerah yang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar.

Pilkada 2018 akan digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, termasuk daerah-daerah yang menjadi pusat ekonomi utama, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Pilkada serentak akan menjadi awal rangkaian tahun politik sebelum masuk ke agenda Pemilu 2019, di mana nama calon pasangan presiden dan wakil presiden sudah harus masuk dan ditetapkan pada tahun depan,” sebut Hendri.



Layanan pajak; kebijakan yang lebih optimal

Sementara itu, Muhammad Ishak, peneliti senior CORE, mengatakan, daya dorong ekonomi global terhadap ekonomi domestik pada tahun depan masih terbatas jika dibandingkan dengan tahun ini. Hal itu tidak akan memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian Tanah Air ke depannya.

Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa, diperkirakan mengalami perlambatan pada 2018. “Dengan demikian, ekspor ke negara-negara tersebut juga akan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun ini,” katanya.

Meski begitu, kata Ishak, peluang ekspor Indonesia ke Tiongkok diperkirakan masih cukup prospektif. Walaupun pertumbuhan PDB negara tersebut melemah, pertumbuhan permintaan domestiknya masih relatif kuat. Selain peningkatan dari sisi permintaan, peningkatan ekspor akan ditopang oleh kenaikan harga beberapa komoditas andalan Indonesia, seperti minyak bumi, gas, *palm oil*, nikel, dan tembaga.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasentiantono, mengatakan, pertumbuhan memang tetap akan terjadi, tapi masih sedikit di bawah target pemerintah. Pasalnya, daya beli masyarakat masih belum bisa membaik sampai dengan tahun depan. Masyarakat masih cenderung mengerem konsumsinya. “Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari 5,3% belum memungkinkan karena faktor *VUCA* (*volatility, uncertainty, complexity*, dan *ambiguity*) yang cukup kuat,” ujarnya.

Kendati demikian, pertumbuhan yang terjadi pada 2018 diyakini tetap lebih baik daripada 2017. Menurut dia, masih ada beberapa faktor yang cukup membebani pertumbuhan ekonomi pada 2017, seperti agresivitas pajak. ■

Targetkan Pertumbuhan Moderat

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 5,4% pada APBN 2018 menggambarkan kondisi perekonomian pada tahun mendatang. Hal itu harus dikawal oleh segenap pemangku kebijakan agar target tersebut bisa terealisasi.

Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah ternyata turut diamini oleh regulator. Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperkirakan kondisi ekonomi Indonesia pada 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan 2017. Meredanya tensi geopolitik global merupakan salah satu indikatornya.

“Kondisinya akan lebih baik karena semua indikator 2018 itu lebih baik daripada indikator 2017. Proyeksi IMF dan Bank Dunia untuk negara-negara maju dan berkembang juga meningkat,” kata Wimboh dikutip dari *Antara*.

Menurut Wimboh, kondisi geopolitik yang mulai mereda tidak berdampak langsung terhadap kondisi di Tanah Air. Hal itu juga yang membuat ekonomi nasional bisa tetap tumbuh.

Tidak hanya itu. Perbaikan ekonomi Tiongkok yang diyakini tumbuh positif pada 2018 juga akan berpengaruh terhadap Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan impor negara tersebut terhadap produk Indonesia akan kembali meningkat.

Selain kondisi luar negeri yang membaik, kondisi dalam negeri cukup mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari likuiditas perbankan yang kuat dan permoralan perbankan yang cenderung meningkat setiap tahun.

Wimboh optimistis, penyaluran kredit masih akan bertumbuh sekitar 11%-12% pada 2018. Optimisme tersebut didasari oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah lebih dari 5% pada tahun ini, demikian juga diperkirakan tahun depan.

Seiring dengan pertumbuhan kredit, OJK berharap pada 2018 *NPL* bisa ditekan di bawah 3%. Pendorong kredit pada 2018 salah satunya dari sektor korporasi.

Proyeksi BI

Bank Indonesia (BI) mengubah proyeksi pertumbuhan kredit akhir 2017 menjadi *single digit* atau 8% dari sebelumnya 8% sampai dengan 10%. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan kredit yang masih lambat hingga September 2017.

Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengungkapkan, pertumbuhan kredit pada September 2017 tercatat 7,86% (*year*



Wimboh Santoso; akan lebih baik

on year atau *yoy*), atau menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya 8,3% (*yoy*). “Kita mengamati bahwa untuk kredit itu di September tumbuh 7,86% (*yoy*), memang lebih rendah dibandingkan dengan Agustus. Tapi, kalau dibandingkan dengan Juni itu tumbuhnya 7,55%. Jadi, terlihat bahwa kalau dibandingkan dengan Agustus itu ada sedikit penurunan,” ujarnya.

Secara *year to date* (Januari-September 2017), pertumbuhan kredit tercatat sebesar 3,8%. Dengan kondisi tersebut, bank sentral pun mengubah proyeksi pertumbuhan kredit menjadi sebesar 8%.

“Kita melihat sampai dengan akhir tahun bank akan berusaha untuk mencapai *business plan* yang disampaikan, namun realisasinya akan ada di kisaran bawah dari target BI yang 8%-10%, maka BI memperkirakan 8% tumbuhnya,” ucap Agus.

Masih rendahnya pertumbuhan kredit sejalan dengan masih lemahnya permintaan (*demand*) kredit. Selain itu, baik korporasi maupun bank tengah melakukan konsolidasi sehingga hal tersebut menghambat permintaan kredit di perbankan.

“Korporasi-korporasi pada umumnya baru menyelesaikan konsolidasi dengan melakukan pengendalian biaya-biaya sehingga mereka mau meyakini neraca mereka lebih sehat dan sekarang ini mereka belum mau mengajukan permintaan (kredit),” ujar Agus.

Kendati demikian, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah intermediasi perbankan yang belum kuat. Terjaganya stabilitas sistem keuangan tecermin dari rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio* atau *CAR*) perbankan yang cukup tinggi pada level 23% dan rasio likuiditas pada level 22,6% pada September 2017.

Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada September 2017 tercatat 11,7% (*yoy*), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya 9,6% (*yoy*). Secara keseluruhan pada 2017, DPK diperkirakan tumbuh sekitar 10%. “Rasio kredit bermasalah juga berada di level 2,9% (*gross*) atau 1,3% (*net*),” pungkasnya. ■

Menajamkan Integrasi Perbankan

ASEAN Banking Council Meeting ke-47 sukses diselenggarakan pada 23-24 November 2017 di Da Nang, Vietnam. Vietnam Banks Association (VNBA) menjadi tuan rumah pada *event* tersebut. Selain dihadiri sekitar 200 bankir senior dari 10 negara ASEAN, pertemuan kali ini mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN.

Dalam pidatonya, Le Luong Minh mengungkapkan kesuksesan transformasi ASEAN, terutama setelah disepakatinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 lalu. Saat ini ASEAN dikenal sebagai salah satu kawasan lokomotif ekonomi global.

Menurutnya, perekonomian ASEAN secara kolektif kini menempati posisi keenam di dunia dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan sekitar US\$2,6 triliun. ASEAN juga menjadi pasar terbesar ketiga dengan populasi gabungan 640 juta orang. Pada 2016 ASEAN menyumbang 7% terhadap perdagangan global. Dan, hampir seperempat dari total perdagangan ASEAN bersifat intra-regional.

Le Luong Minh juga mengungkapkan, dalam cetak biru (*blueprint*) MEA telah dikembangkan Rencana Aksi Strategis ASEAN 2016-2025, yang menyoroti tiga pilar utama, yakni integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan. Integrasi keuangan dipandu oleh ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), dan penyertaan keuangan melalui Kerangka Inklusi Keuangan ASEAN. Perkembangan keuangan digital telah disorot sebagai *enabler* utama dalam pengembangan ini.

“Dalam 50 tahun terakhir, ASEAN telah berkembang menjadi entitas ekonomi global yang penting, yang mampu menempa jalur yang lebih kuat untuk memperluas potensinya sebagai aktor global yang signifikan dan berpengaruh. Prestasi masa lalu dan tonggak sejarah membuat ASEAN lebih teguh dalam komitmennya untuk mengejar integrasi ekonomi regional yang lebih dalam, di mana integrasi keuangan telah memainkan peran penting dalam mendukung proses tersebut,”

Peserta ASEAN Banking Council Meeting ke-47 dari Indonesia:

1. **Farid Rahman**, mewakili Kartika Wirjoatmodjo sebagai Ketua ASEAN Bankers Association.
2. **Irwan M. Habsjah**, Ketua Delegasi dari Indonesia.
3. **Abdul Rachman**, Pengurus Bidang Luar Negeri Perbanas.
4. **Sukatmo Padmosukarso**, Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas.
5. **Tri Joko Prihanto**, Sekretaris Yayasan Pendidikan Perbanas.
6. **Marsudi Wahyu Kisworo**, Rektor Perbanas Institute.
7. **Nurcholis Wahyudi**, Direktur Bank Mantap.
8. **Paulus Endra Suyatna**, Direktur Bank Mantap.
9. **Abraham Jozef Adriaansz**, Direktur PT Rintis Sejahtera.
10. **Achmad Friscantono**, Direktur Eksekutif Perbanas.



terang Le Luong Minh, seperti dirilis dalam keterangan pers pihak penyelenggara.

Sementara itu, Madame Nguyen Thi Hong, Wakil Gubernur VNBA, dalam sambutannya mendesak bank-bank asing agar berkomitmen untuk lebih meningkatkan integrasi sektor keuangan dan membentuk hubungan yang efektif dengan sektor swasta di wilayah ASEAN. Menurutnya, peran sektor perbankan di kawasan ASEAN menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Karena, bank dapat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperluas inklusi keuangan di semua sektor sosial melalui penggunaan *financial technology (fintech)*.

Farid Rahman, mewakili Ketua ASEAN Bankers Association dan Ketua Umum Perbanas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemajuan lebih lanjut telah dilakukan di bawah ABIF, di mana kesepakatan telah ditandatangani Indonesia dan Malaysia. Selain itu, negosiasi tengah dilakukan antara Malaysia dan Filipina mengenai Qualified ASEAN Bank (QAB).

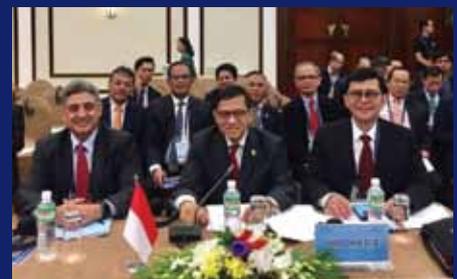
Farid menilai, hal itu seharusnya menjadi ujung tombak promosi pengembangan keuangan lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi regional yang lebih tinggi, yang melekat pada prinsip inklusivitas, transparansi, dan timbal balik bagi seluruh masyarakat di kawasan ASEAN. Dalam konteks tersebut, perlu juga dicatat bahwa ada penekanan kuat pada pengembangan kapasitas di semua area untuk menghadapi tantangan global. ■

ASEAN Banking Council Meeting Ke-47

Pada 23-24 November 2017 ASEAN Banking Council Meeting ke-47 diselenggarakan di Furama Resort Danang, Da Nang, Vietnam. Vietnam Banks Association (VNBA) bertindak sebagai tuan rumah dalam pertemuan kali ini.

Pertemuan yang diikuti 200 bankir dari 10 negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ini menghadirkan Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN dan perwakilan dari International Finance Corporation (IFC). Delegasi Indonesia diketuai Irwan M. Habsjah, Ketua Bidang Luar Negeri Perbanas. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya pengembangan *financial technology (fintech)*, *cyber security*, serta kerja sama pengembangan *training* dan program sertifikasi.

Dalam pertemuan ini kepemimpinan ASEAN Bankers Association (ABA) diserahkan dari Indonesian Banks Association (Perbanas) kepada Lao Banker's Association (LBA). Perbanas diwakili Farid Rahman dan LBA diwakili Phuokhong Canthachack. ASEAN Banking Council Meeting ke-48 akan digelar di Brunei Darussalam pada November 2018. ■



Membuat Terang Perpajakan bagi Perbankan

Kebijakan perpajakan yang bersinggungan dengan sektor perbankan masih menimbulkan pertanyaan bagi pengelola sektor ini. Melalui “CEO Breakfast Meeting”, Perbanas ingin memberikan gambaran yang jelas tentang hal tersebut kepada pelaku bisnis perbankan.

Berdiskusi dan bertukar pikiran seperti sudah menjadi budaya di lingkungan Perbanas. Salah satunya, melalui kegiatan “CEO Breakfast Meeting” yang digelar rutin setiap tiga bulan oleh Perbanas untuk membahas setiap permasalahan atau tantangan guna menemukan solusi ataupun strategi. Forum ini dihadiri segenap *stakeholders* dan profesional di kalangan perbankan.

Melalui forum tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan muncul rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan sektor perbankan. Forum tersebut biasanya menghadirkan pihak-pihak yang bisa memberikan gambaran tentang pelbagai hal yang sangat dibutuhkan pelaku perbankan. Semua anggota Perbanas secara bergiliran menjadi tuan rumah agenda ini.

Bank Mandiri, misalnya, pada 30 November 2017 mendapat giliran menjadi tuan rumah penyelenggaraan “CEO Breakfast Meeting”. Mandiri Club yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta, menjadi pilihan Bank Mandiri untuk menggelar acara tersebut. Tema yang diangkat dalam “CEO Breakfast Meeting” kali ini adalah “Kebijakan Fiskal dan Implikasinya terhadap Sektor Perbankan”.

Dalam sambutannya, Kresno Sediarsi, Wakil Ketua Umum Perbanas yang mewakili Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, mengingatkan pentingnya teknologi yang menjadi kebutuhan sektor perbankan. Kemajuan teknologi harus menjamin keamanan nasabah dalam bertransaksi juga keamanan data perbankan agar jangan sampai disalahgunakan.

Kebijakan fiskal menjadi pilihan tema “CEO Breakfast Meeting” kali ini agar pelaku bisnis perbankan mengetahui sejauh mana implikasi kebijakan yang digulirkan otoritas perpajakan terhadap industri perbankan. Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan, hadir untuk menyampaikan paparan dalam *meeting* bulanan tersebut. Mengawali sesi diskusi, Aviliani, *Chief*



Economist Perbanas, memaparkan kinerja sektor perbankan pada 2017.

Dalam paparannya, Slamet menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Menurut Slamet, perlu ada regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan data nasabah. OJK sebagai otoritas sangat *concern* pada hal-hal yang juga menjadi *concern* Perbanas. Melihat kronologis komitmen Indonesia atas penerapan AEOI pada 2018, perbankan sebenarnya telah mempersiapkannya sejak 2015. Perangkat peraturannya pun sudah ada. Namun, Slamet menekankan perlunya mekanisme yang jelas. Melengkapi paparan Slamet, Yustinus menyampaikan perlunya kesiapan perbankan untuk menghadapi penerapan AEOI, yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. ■

CEO Breakfast Meeting Bahas Kebijakan Fiskal

Pada 30 November 2017 Perbanas menggelar *CEO Breakfast Meeting* bertajuk “Kebijakan Fiskal dan Implementasinya di Sektor Perbankan” di Mandiri Club, Jakarta. Dalam *CEO Breakfast Meeting* kali ini, Bank Mandiri bertindak sebagai tuan rumah. Acara tersebut diisi dengan sesi diskusi yang melibatkan pengurus Perbanas dan para profesional di industri perbankan yang mewakili bank-bank anggota Perbanas.

CEO Breakfast Meeting kali ini dibuka oleh Kresno Sediarsi, Wakil Ketua Umum Perbanas. Hadir sebagai pembicara dalam sesi diskusi Slamet Edy Purnomo, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yustinus Prastowo, pengamat perpajakan. Aviliani, *Chief Economist* Perbanas, membuka sesi diskusi dengan memaparkan kinerja perbankan nasional pada 2017. ■



Ramai-Ramai Garap Fintech

Era disruptif mendorong persaingan makin ketat dan melebar dengan hadirnya pendatang baru bernama *fintech*. Bagi perbankan, itu bukanlah masalah besar karena kini bank juga ikut serta mengembangkan *fintech*.

Para pelaku usaha di sektor perbankan terus berinovasi dan mengembangkan usahanya di tengah ketatnya persaingan. Industri yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional ini terus mempersiapkan diri menuju perubahan dan menghadapi era disruptif. Persaingan yang makin ketat kian melebar dengan hadirnya perusahaan *start up* yang merupakan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)*.

Pada sebuah kesempatan, Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, menyatakan bahwa industri perbankan saat ini menghadapi dua tantangan.

Satu, pertumbuhan kredit yang masih *single digit* dan di bawah harapan industri. Dua, disrupsi dalam bisnis jasa keuangan.

Jika tidak melakukan inovasi, Kartika memprediksi, dalam beberapa tahun ke depan *fintech* bisa mengambil alih pasar perbankan. Hal itu ditandai dengan bisnis *crowdfunding* dan *lending* yang saat ini telah banyak dijalankan perusahaan-perusahaan *fintech*.

Terkait dengan perkembangan tersebut, Kartika menilai, bank harus aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan *fintech*. Sebab, perusahaan *fintech* unggul dalam hal inovasi, sementara bank unggul dalam infrastruktur teknologi informasi (TI). Banyak langkah yang bisa diambil pelaku industri perbankan, baik secara organik maupun anorganik, untuk menghadapi perkembangan *fintech*. Kartika mencontohkan Bank Mandiri, yang telah melakukan investasi ke beberapa perusahaan *start up* lewat entitasnya, Mandiri Capital Indonesia.



Event *fitech*; bank harus aktif bekerja sama dengan *fintech*

Dari Akuisisi hingga Kompetisi

Berbagai upaya ditempuh perbankan untuk bisa mengambil peran penting dalam perkembangan digital dan teknologi saat ini. Para pelaku usaha di sektor perbankan pun harus jeli melihat peluang seiring dengan perkembangan tersebut.

Bank Central Asia (BCA), misalnya. Melalui anak perusahaan dengan model bisnis modal ventura, yakni Central Capital Ventura (CCV), BCA mulai menggarap pasar *fintech* yang didorong untuk masuk dalam pembiayaan segmen *small and medium enterprise (SME)* dan mikro.

BCA telah menyuntikkan modal awal sebesar Rp200 miliar kepada CCV. Anak perusahaannya itu diharapkan dapat bersaing di tengah pesatnya perkembangan teknologi internet dan telekomunikasi di Indonesia. "Kami melalui CCV masuk ke bisnis *start up company*. Dia '*kan micro loan*. Kami akan masuk ke *SME* dan *micro lending*," ujar Direktur BCA, Henry Koenafi.

Menurut Henry, meski CCV sudah berdiri sejak awal 2017, BCA sebagai induk belum mau menambah modal. Perseroan saat ini masih melihat prospek anak perusahaannya tersebut. “Kami setor modal sebesar Rp200 miliar. Dengan modal ini, bisa investasi. Investasinya *enggak* besar-besar dulu, sedikit dulu. Kami lihat lagi situasinya seperti apa,” ucap Henry.

Untuk menyalurkan pembiayaannya, Henry mengungkapkan, CCV akan melakukan kerja sama dengan lembaga penyalur pinjaman, seperti bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi. “Jadi, kami sudah kerja sama dengan beberapa BPR. Kami kerja sama, salah satunya kerja sama dengan Klik Acc. Kami juga membutuhkan kerja sama dengan koperasi untuk menjangkau pembiayaan,” terangnya.

Tak hanya BCA, Bank Negara Indonesia (BNI) juga mengaku akan menghadirkan produk baru berbasis digital guna menghadapi persaingan dengan perusahaan rintisan di bidang *fintech*. Untuk memuluskan langkah tersebut, BNI rencananya akan mengakuisisi salah satu perusahaan *fintech*.

“Dalam meluncurkan produk baru tersebut, BNI berniat untuk mengakuisisi salah satu perusahaan *fintech* guna mempermudah proses transaksi nasabah setia BNI. Proses akuisisi tersebut akan dilakukan melalui bisnis modal ventura,” terang Putrama Wahyu Setiawan, Direktur Bisnis Menengah BNI.

Menurut Putrama, kerja sama dan sinergi tersebut merupakan kombinasi yang ideal karena kedua belah pihak masih saling membutuhkan satu sama lain. “Karena *fintech* masih membutuhkan bank untuk lembaga penampungan dana mereka,” jelasnya.

Putrama juga menyatakan, kehadiran *fintech* saat ini memang masih menjadi tantangan bagi perbankan. Sejauh ini porsi transaksi *fintech* kian meningkat seiring dengan kemudahan layanan yang ditawarkannya. “*Fintech* berupaya mendapatkan porsi dari transaksi keuangan yang sedang gencar dilakukan dengan berbagai metode pembayaran yang sangat memudahkan. Bank harus melakukan suatu upaya agar memudahkan transaksi tanpa mengurangi keamanan,” ungkapnya.

Terkait dengan hal itu, langkah BNI untuk mengakuisisi *fintech* dinilai tepat agar dapat bertahan di tengah menjamurnya industri *fintech*. Menurut Putrama, langkah ini merupakan jawaban atas tantangan agar pangsa pasar tidak tergerus dan menjadi upaya bank untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) pun tak mau ketinggalan. Bank pelat merah ini telah merampungkan proses akuisisi terhadap anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yakni PT Bahana Artha Ventura (BAV). BRI membeli 71.207 lembar saham baru atau 35% saham BAV senilai Rp71,32 miliar.

Menurut keterangan yang tertera dalam keterbukaan

informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI), BRI menempatkan investasi BAV sebagai bagian dari strategi pertumbuhan nonorganik yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang perseroan 2013-2017. Ini merupakan salah satu strategi BRI dalam rencana bisnis bank 2012-2019 (revisi).

Akuisisi tersebut merupakan salah satu langkah untuk mencapai aspirasi perseroan sebagai penyedia layanan keuangan terintegrasi. “Salah satu pertumbuhan nonorganik yang direncanakan oleh perseroan adalah penyertaan pada lembaga keuangan nonbank dengan produk/jasa yang bersifat melengkapi produk/jasa perseroan,” demikian yang tertulis dalam keterangan tersebut.

BAV akan menjadi kendaraan BRI untuk mengembangkan bisnis jasa keuangan yang sedang berkembang pesat saat ini, yakni *fintech*. “Kami sudah punya program terkait dengan *fintech*, akan kami kembangkan di sana. Semoga mendorong pertumbuhan bisnis BRI,” ujar Direktur Utama BRI, Suprajarto.

Sementara itu, Bank Mandiri melalui anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia, melakukan upaya pengembangan *fintech* dengan menggelar “Finspire”.

Ajang tersebut digelar untuk menggaet perusahaan *start up fintech* yang potensial untuk dikembangkan melalui pembiayaan dan pelatihan.

Kompetisi yang berlangsung pada 18-19 Oktober 2017 itu diikuti sebanyak 71 perusahaan *start up* dari dalam dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut mempresentasikan produk-produk terkait *fintech* untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi keuangan. Melalui penyelenggaraan kompetisi bisnis bagi perusahaan *start up fintech* tersebut, penyelenggara ingin mendapatkan *deal flow* berkualitas yang telah siap untuk dipasarkan.

Direktur Utama Mandiri Capital, Eddi Danusaputro, menjelaskan, ajang kompetisi “Finspire” terdiri atas beberapa rangkaian acara, yaitu *workshop*, *mentorship*, dan seleksi *start up*. Topik yang dibahas dalam *workshop* tersebut antara lain *regulatory clinic*, *partnership*, *product development*, serta *growth and marketing*. Setelah mengikuti *workshop*, peserta harus melalui proses *mentoring* dan penjurian bersama pelaku-pelaku industri *fintech*, baik dari *venture capital* maupun *start up*, seperti Mandiri Capital Indonesia, MDI, Skystar, Venturra Capital, East Ventures, dan Convergence.

Para pemenang kompetisi “Finspire” mendapatkan uang tunai masing-masing senilai Rp80 juta untuk juara pertama, Rp50 juta untuk juara kedua, dan Rp30 juta untuk juara ketiga. Para pemenang juga mendapatkan *golden ticket* untuk mengikuti program inkubator selama enam bulan guna mengembangkan bisnis. Melalui program inkubator, pemenang mendapatkan *free co-working space*, *potential investment*, dan sinergi dengan Mandiri Group. ■



Kartika Wirjoatmodjo; dua tantangan

LTV Spasial Masih dalam Kajian

BI terus mendorong pertumbuhan kredit diiringi dengan peningkatan kualitas penyaluran kredit. Salah satu upaya yang direncanakan BI ialah penerapan *LTV* spasial.

Beberapa bulan terakhir Bank Indonesia (BI) terus melakukan kajian dan pematangan kebijakan atau aturan penerapan rasio kredit terhadap nilai agunan berdasarkan wilayah atau *loan to value (LTV)* spasial. Kebijakan relaksasi tambahan *LTV* yang disesuaikan dengan keadaan provinsi atau *LTV* spasial tersebut merupakan salah satu rencana kebijakan pelonggaran makroprudensial bank sentral. Selama ini kebijakan *LTV* ditetapkan sama secara nasional untuk dua sektor, yakni sektor properti dan otomotif. Hal itu disampaikan Deputy Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara. “Aturan *LTV* bisa dilonggarkan. Tapi, di daerah yang *NPL*-nya tinggi untuk sektor perumahan justru mungkin saja bisa diperketat,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mirza, penetapan *LTV* spasial mengacu pada harga tanah, juga kebutuhan hunian di masing-masing daerah. Dalam hal ini tentu diperlukan kerja sama para developer dan asosiasi.

Penerapan *LTV* spasial dinilai mampu memitigasi risiko kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga *NPL* dapat lebih terjaga. “Makanya penting sekali tentang informasi perkembangan harga rumah karena akan juga memengaruhi harga tanah,” tukas Mirza.

Berdasarkan kajian BI, setidaknya ada tiga kriteria bagi daerah yang akan mendapatkan relaksasi *LTV* untuk KPR.

Pertama, kredit properti di provinsi itu masih lebih rendah daripada penyaluran kredit yang dibutuhkan menurut kajian BI. “Memang ada provinsi yang kreditnya terlalu rendah, maka disambung relaksasi nasional. Ada tambahan relaksasi untuk provinsi itu,” ujar Perry Warjiyo, Deputy Gubernur BI.

Kedua, provinsi dengan harga perumahan yang terlalu rendah. BI akan melihat acuan harga perumahan dari tren yang sedang terjadi. “Apakah rumah ataupun apartemen, sektornya di perumahan,” ucap Perry. Ketiga, provinsi dengan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

Provinsi yang memenuhi ketiga kriteria tersebut akan mendapat tambahan relaksasi *LTV*, selain keringanan *LTV* nasional yang sudah diterapkan sejak 2016.

Sebagai informasi, berdasarkan kebijakan relaksasi *LTV* nasional yang sudah berlaku, BI menetapkan *LTV* rumah



Kompleks perumahan; ada tiga kriteria

tapak pertama dengan tipe lebih dari 70 sebesar 85%, rumah kedua 80%, sedangkan yang ketiga dan seterusnya 75%. Besaran yang sama berlaku untuk rumah susun.

Sejauh ini BI telah melakukan diskusi dengan para pelaku usaha di sektor perbankan. Direktur Bisnis Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan, diskusi yang sudah dilakukan antara BI dan industri perbankan terkait dengan masukan dan pandangan dari pelaku industri terhadap wacana bank sentral untuk merelaksasi kebijakan *LTV* berdasarkan wilayah. “Kalau pembicaraannya lebih kepada minta masukan dari industri, tapi spesifiknya seperti apa nanti BI yang akan mengeluarkan,” ujarnya.

Menurut Anggoro, diskusi yang dilakukan BI dengan pelaku industri perbankan baru pada tahap *LTV* di sektor properti saja. “Kita *sih* tidak spesifik spasial ya. Kita lebih kepada relaksasi *LTV* dan kepemilikan rumah kedua dan ketiga. Selama ini ‘*kan* yang sudah direlaksasikan rumah kedua. Nah, rumah ketiga ‘*kan* belum,” ucapnya.

Menunda Penerbitan

BI memutuskan untuk menunda rencana mengeluarkan *LTV* spasial yang sebelumnya akan diterbitkan dalam waktu dekat pada 2017. Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo,

mengatakan, ada beberapa alasan mendasar kenapa BI menunda mengeluarkan kebijakan LTV spasial. Salah satunya, sejauh ini pihak BI masih terus melakukan kajian.

“Kita belum melihat satu struktur yang tepat untuk diimplementasikan. Jadi, kita arahnya adalah LTV untuk dialami lagi dan diperluas, bukan hanya melihat dari spasial dalam arti regional, provinsi-provinsi, tetapi juga dilihat berdasarkan *targeted segment*,” terang Agus.

Agus menambahkan, kajian terkait dengan aturan LTV spasial ini akan dibahas lebih jauh dalam Rapat Dewan Gubernur BI. Ada sinyal dari pihak bank sentral bahwa payung hukum mengenai aturan tersebut tidak akan diterbitkan pada tahun ini. “Kami masih mendalami, dan dalam pertemuan rapat dewan gubernur akan kami bahas. Belum terlihat akan keluar dalam waktu dekat,” ujar Agus.

Menurut Agus, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bank sentral, antara lain kondisi pertumbuhan kredit properti di tiap wilayah serta kondisi rasio kredit bermasalah di sektor properti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank sentral pun masih perlu mengkaji rencana tersebut. Dari analisis indikator yang lain, itu belum terlalu kuat kalau mengeluarkan kebijakan atas dasar spasial.

Meskipun aturan LTV spasial belum dapat dipastikan kapan keluarnya, pihak BI memastikan akan segera mengeluarkan aturan rasio pembiayaan terhadap pendanaan

atau *financing to funding ratio (FFR)*. Rencananya, payung hukum aturan ini akan dikeluarkan pada semester satu tahun depan. “Kami akan lakukan penyesuaian, dan itu di semester pertama 2018,” ucap Agus.

Ketentuan FFR merupakan penyempurnaan dari kebijakan *loan to funding ratio (LFR)*. Dengan adanya penyempurnaan ini, perbankan akan terdorong untuk meningkatkan fungsi intermediasi pembiayaan ke sektor infrastruktur, selain melalui penyaluran kredit.

“Yang ingin kami respons adalah sekarang ini rata-rata LTV untuk kredit properti itu 85% dan itu termasuk tinggi di dunia. Jadi, kita ingin menjelaskan bahwa sebetulnya LTV kita sudah cukup baik karena di dunia umumnya ada di kisaran 70%-80%,” ungkap Agus.

Kendati demikian, BI melihat bahwa penyesuaian atau pengetatan LTV akan dilakukan bank sentral saat kredit properti terlalu ekspansif. Menurut Agus, pengetatan LTV sangat efektif dilakukan saat kredit properti terlalu tinggi yang dikhawatirkan akan memicu *bubble* properti ke depannya.

“Untuk mendorong kredit properti agar ekspansif itu, ternyata melonggarkan LTV tidak terlalu berdampak langsung dan itu terlihat pada dua tahun terakhir. Kita sudah melonggarkan LTV, tapi dampaknya ke pertumbuhan kredit properti ternyata baru kelihatan di Juli 2017,” ujar Agus. ■

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. JOTUN INDONESIA



Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPH tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2017 sebesar Rp. 2.198.815.253,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
MAKMUR ABADI	-	JL.JEND SUDIRMAN NO.10B KEC.WONOMULYO KAB.POLMAN INDONESIA	100.000.000	22.290.799
TOKO BESI PUTRA AMIN	-	JL.PALEMBANG-BETUNG KM.42.5 NO.82,83,84 DESA KAYU ARE KUNING INDONESIA	100.000.000	25.594.800
CV. MAINTENINDO DWIPUTRA	03.302.360.7-805.000	JL.SUKARIA NO.7 TAMAMAUNG, PANAKKUKANG, MAKASSAR SULAWESI SELATAN INDONESIA	50.000.000	40.289.935
TOKO TUNAS RAYA JAYA	-	JL.A.YANI RT.XXII KEL.MUARA JAWA ULU KEC.MUARA JAWA INDONESIA	100.000.000	46.831.286
PT. EKA PRIMA GRAHA	31.422.798.8-517.000	SETIABUDI 203 RT.005 RW.002 BANYUMANIK, SEMARANG JAWA TENGAH INDONESIA	150.000.000	49.386.400
PT. CENTRAL METAL COATING	02.419.950.7-402.000	JL BARU ZONA INDUSTRI KERONCONG NO. 8 KERONCONG - JATI UWUNG TANGERANG BANTEN 15134 INDONESIA	100.000.000	64.180.520
PT. CIPTAJAYA MITRA MANDIRIE	02.185.951.7-044.000	MALL MANGGADUA SQUARE LT.2 BLOK A NO.183 JL.GUNUNG SAHARI JAKARTA UTARA RAYA NO.1,ANCOL PADEMANGAN INDONESIA	100.000.000	82.354.700
CV. KARYA PRATAMA ABADI	71.880.494.1-315.000	JL.SISINGAMANGARAJA NO.42 RT.RW. KEL.KUDAY KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEC.SUNGAILIAT BANGKA INDONESIA	100.000.000	87.093.994
PT. TIAS NUSA CIPTA	02.289.706.0-411.000	JL. MADURA I BLOK 0.1/45 SEKT.XIV-5 BSD RT.07 RW.07 RAWA MEKAR JAYA SERPONG INDONESIA	100.000.000	87.955.000
PT. LAPPIM	31.478.270.7-423.000	JL.SIDOMUKTI NO.34 RT.009 RW.011 CIBEUNYING KALER, SUKALUJU BANDUNG, JAWA BARAT INDONESIA	100.000.000	89.810.659
CV. SUMBER JATI	01.918.425.8-603.000	DESA GLAGAHARUM RT/RW :009/002 GLAGAHARUM, PORONG SIDOARJO - 61274 INDONESIA	150.000.000	102.356.032
PT. YASPIS PERMATA TRANS	02.026.035.2-603.000	JL.MANGGIS X/M-726 PCI RT/RW: 003/007 TAMBAREJO-WARU, SIDOARJO-61256 INDONESIA	150.000.000	109.195.926
CV. MAURA PERKASA	03.013.044.7-721.000	JL.KUTILANG I NO.04 RT.025 GUNUNG BAHAGIA, BALIKPAPAN SELATAN-KALIMANTAN TIMUR INDONESIA	150.000.000	109.877.660
TOKO MAJU TERUS MAKMUR	-	JL.RAYA JATI MULYA NO.31-33 * BEKASI TIMUR INDONESIA	150.000.000	110.832.403
PT. BOSSEGORO INDOYARD CONSORTIUM	02.909.520.5-606.000	JL.PUCANG ANOM TIMUR 6/22 KEL.KERTAJAYA, KEC.GUBENG SURABAYA-JAWA TIMUR INDONESIA	150.000.000	123.577.930
PT. KALTIM CITRA NUSANTARA	03.176.677.7-724.000	JL.TIPALAYO NO.33 RT.033 BERBAS TENGAH, BONTANG SELATAN BONTANG INDONESIA	150.000.000	148.598.570
PT. TIMUR SHIP MANAGEMENT	31.212.443.1-003.000	JL.RAYA BEKASI TIMUR RAYA KM.17 D III C-12 RT.001 RW.007 JATINEGARA KAUM, PULOGADUNG INDONESIA	500.000.000	163.280.494
PT. SUMRE1CON	02.724.453.2-721.000	JL.PROJAKAL RT.31 BATU AMPAR - BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN INDONESIA	200.000.000	169.962.925
CV. MET	01.923.956.5-418.000	DESA BUARANJATI RT001 RW.004 SUKADIRI, MAUK TANGERANG - BANTEN INDONESIA	200.000.000	173.705.400
PT. IONASEA MARINE SERVICES	03.080.426.4-014.000	GEDUNG GRAHA KAPITAL JL.KEMANG RAYA NO.4 BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN INDONESIA	200.000.000	174.460.341
CV. TRI PUTRA WIJAYA	02.774.599.1-518.000	JL.GALAR I NO.26 RT.001 RW.016 TLOGOSARI KULON, PEDURUNGAN SEMARANG-JAWA TENGAH 50196 INDONESIA	50.000.000	217.179.480
JUMLAH				2.198.815.253

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Antonius Ketut Dwirianto,
Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko & Legal Affairs PaninBank

Tumbuh Terbatas di Tengah Tantangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 diproyeksikan lebih baik ketimbang 2017, walaupun agak sedikit tertahan. Tentunya hal yang sama pun akan berlaku pada industri perbankan.

Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami sedikit perlambatan. Hal ini pun berdampak pada sejumlah sektor usaha, termasuk industri perbankan. Namun, dengan adanya berbagai perbaikan di beberapa sektor dan kondisi ekonomi global, perekonomian saat ini pun mulai mengalami perbaikan. Diharapkan kondisi tersebut berdampak positif terhadap perkembangan industri perbankan ke depan.

Para pelaku usaha di sektor perbankan merespons positif perbaikan yang terjadi dan optimistis bisa membukukan kinerja yang lebih baik pada 2018. Memang, pergerakan ekonomi dinilai masih akan tertahan karena sebagian pelaku usaha masih *wait and see* terkait dengan perkembangan ekonomi ke depan.

Bagaimana para pelaku bisnis perbankan menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini dan strategi apa yang akan diterapkan ke depan, mengingat tantangan yang dihadapi perbankan kian berat? Pemain-pemain baru pesaing industri perbankan terus bermunculan, seperti perusahaan *start up* atau *financial technology (fintech)*. Di lain sisi, pelaku perbankan juga dihadapkan pada regulasi yang kian beragam.

Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, berikut penjelasan Antonius Ketut Dwirianto, Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Legal Affairs PaninBank, kepada *Probank*. Petikannya:

Melambatnya perekonomian Indonesia berpengaruh pada kinerja perbankan nasional. Bagaimana Anda melihat industri perbankan hingga akhir 2017?

Hingga akhir 2017, pertumbuhan bisnis bank masih akan bergerak moderat cenderung rendah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tertahan di 5,0% hingga 5,1% pada akhir tahun. Hal tersebut mendorong kami memperkirakan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional akan berada di 8% hingga 10% (*year on year* atau

yoy); sementara DPK (dana pihak ketiga) diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dengan angka pertumbuhan antara 9% (yoy) dan 11% (yoy). Hal ini didasarkan pada perilaku *business as usual* yang cenderung mendorong permintaan kredit pada periode akhir tahun.

Bagaimana dengan 2018?

Pada 2018 mendatang kami melihat perilaku *wait and see* pelaku ekonomi masih akan tetap terjadi sehingga tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi kami perkirakan masih sedikit tertahan, walau kami perkirakan lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Namun, dengan turunnya suku bunga acuan yang terjadi pada Agustus dan September lalu, yang kami perkirakan akan sepenuhnya disesuaikan (*fully adjusted*) oleh pihak perbankan, begitu pun dengan iklim investasi dan makin baiknya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri yang kami pandang bersikap propertumbuhan ekonomi (*procyclical*), maka kami perkirakan 2018 bisnis industri perbankan lebih bergairah. Dengan artian kami perkirakan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional akan lebih baik dibandingkan dengan 2017, dengan angka pertumbuhan kedua hal tersebut kami perkirakan di 10% (yoy) hingga 12% (yoy).

Seperti apa strategi bisnis PaninBank pada 2017 dan 2018?

Secara umum kami tetap memilih kebijakan dan strategi konservatif sepanjang 2017 dan 2018 mendatang. Hal yang menjadi perhatian utama kami adalah mendorong pertumbuhan bank secara baik dan *prudent*. Untuk itu, baik pada tahun ini maupun pada tahun mendatang, kami akan tetap memiliki program prioritas dalam penataan kantor cabang; peningkatan efisiensi dan produktivitas; peningkatan kualitas aset; perbaikan komposisi dana dan penurunan *cost of fund*; serta pemeliharaan permodalan dan likuiditas internal yang kuat.

Selanjutnya, untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut, kami senantiasa mendukung pelaksanaannya melalui peningkatan kualitas SDM; pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi; penguatan implementasi *good corporate governance (GCG)*; dan pengelolaan manajemen risiko secara hati-hati.

Kendati demikian, berbagai hal tersebut akan selalu kami sesuaikan dengan berbagai perkembangan terkini, baik dari sisi ekonomi maupun nonekonomi. Begitu pun dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada pada masa kini maupun masa mendatang.

Bagaimana Anda melihat regulasi perbankan yang dirilis otoritas dalam beberapa tahun terakhir?

Regulasi perbankan yang dirilis otoritas dalam beberapa tahun terakhir sangat beragam. Terdapat regulasi dengan format konversi dengan tambahan pengaturan untuk menyesuaikan perubahan wewenang regulator dari yang sebelumnya Bank Indonesia (BI) menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, terdapat regulasi-regulasi yang menjadi peraturan yang seragam, tidak hanya bagi bank tapi juga bagi lembaga jasa keuangan lainnya. Regulasi lain yang menarik adalah yang mengatur tentang konglomerasi keuangan bagi sebuah grup perusahaan.

Orang Gunung Kidul yang Dikira Orang Bali

Namanya yang menggunakan “ketut” kerap dikira sebagai orang Bali. Padahal, aslinya ia adalah orang Yogyakarta. Kedua orang tuanya asli Gunung Kidul, Yogyakarta. “Hampir semua orang salah kira asal saya dari mana. Tadi saja dalam seminar, moderator mengenalkan saya sebagai orang Bali,” jelas Antonius di sela-sela sebuah seminar yang diikutinya di Hotel Pullman, Jakarta.

Lalu, bagaimana ceritanya hingga terselip kata “ketut” dalam namanya? Pria kelahiran Merauke, Papua, ini menuturkan, kedua orang tuanya memang berasal dari Yogyakarta, tapi ia dilahirkan di Merauke, Papua. Ketika itu, ayahnya yang bekerja di Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri) ditugaskan ke Papua (saat itu bernama Irian Barat), tak lama setelah Irian Barat masuk menjadi bagian Indonesia.

Tak berapa lama orang tuanya bertugas di Papua, Antonius pun lahir, tepatnya pada 31 Desember 1968. Nah, dokter yang membantu kelahiran dirinya itu bernama Ketut, yang merupakan teman sejawat ayahnya dalam bertugas. “Karena saya merupakan pasien pertama, dan untuk memberikan kenang-kenangan, maka saya pun diberikan nama “Ketut” oleh kedua orang tua,” kenangnya.

Antonius sejak belia sudah tertarik bekerja di bank. Ceritanya ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), dia kerap diminta sang ayah untuk membayar listrik di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dari sanalah ia terpincut dengan penampilan dan pola kerja pegawai bank. Saat itu ia menilai pegawai bank memiliki penampilan yang keren dan rapi serta memiliki perilaku yang ramah dan cekatan.

“Tapi, saat itu hanya ingin bekerja di kantor bank. Belum sampai kepikiran menjadi bankir dan belum mengetahui profesi bankir itu seperti apa,” ungkap pria peraih gelar sarjana hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, serta magister hukum bisnis dari Universitas Pelita Harapan (UPH) dan magister kenotariatan dari Universitas Jaya Raya ini.

Regulasi-regulasi tersebut saya pandang baik untuk perkembangan lembaga jasa keuangan, khususnya bank di mana regulator menginginkan agar seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia patuh pada regulasi yang lebih ketat tapi tetap menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Poin-poin penting apa yang menurut Anda perlu diperhatikan otoritas dalam membuat kebijakan?

Poin-poin yang perlu diperhatikan otoritas dalam membuat kebijakan adalah, yang pertama, bagaimana peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh industri perbankan. Hal ini menjadi penting agar peraturan tersebut tidak hanya

menjadi peraturan tertulis, tapi juga dapat dipatuhi oleh industri sehingga dapat mencapai tujuan sebenarnya yang diharapkan. Kendati demikian, kami mengapresiasi saat ini regulator telah memberikan kesempatan bagi industri untuk memberikan pendapat dan masukan mengenai rancangan regulasi yang akan diterbitkan, baik dengan cara diskusi maupun rapat dengar pendapat dan kami mengapresiasi hal tersebut.

Poin penting lain yang harus diperhatikan otoritas adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan makin berkembangnya produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh bank. Layanan *mobile banking*, *internet banking*, serta *electronic money* wajib diatur dengan baik. Jangan sampai kemudahan yang ditawarkan kepada nasabah tidak dilengkapi dengan sistem yang aman. Terlebih lagi ke depannya dimungkinkan adanya layanan seperti pembukaan rekening dengan teknologi tanpa adanya pertemuan langsung dengan nasabah (*face to face*)—agar regulasi dalam hal tersebut dapat diatur dengan baik dan tetap memperhatikan penerapan prinsip pengenalan nasabah.

Sejauh ini menurut penilaian Anda seperti apa respons perbankan terhadap regulasi yang diberlakukan?

Kami menyadari bahwa perbankan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan peraturan yang komprehensif serta pengawasan yang baik agar perbankan dalam menjalankan fungsinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan pada prinsipnya mendorong *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam pengelolaan bank. Sehingga, bank dalam menjalankan aktivitasnya menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat dapat terhindar dari *exposure risk* yang berlebihan yang akan berdampak negatif bagi usaha bank tersebut.

Kami melihat saat ini industri perbankan dalam kondisi *comply* terhadap aturan yang berlaku. Hal itu tercermin dari minimnya informasi negatif terhadap industri perbankan. Selanjutnya, kami melihat Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator terus berupaya menyempurnakan peraturan bagi lembaga jasa keuangan terkait dengan perlindungan konsumen. Hal ini berdampak baik bagi industri perbankan.

Sebagai direktur kepatuhan, bisa dijelaskan bagaimana budaya kepatuhan di PaninBank?

Di PaninBank kami membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha serta setiap jenjang organisasi bank. Melalui satuan kerja kepatuhan, budaya kepatuhan diimplementasikan. Hal ini tercermin dalam proses kegiatan usaha bank, baik dari tahap rencana sampai dengan proses implementasi senantiasa melibatkan satuan kerja kepatuhan.

Opini kepatuhan selalu diberikan kepada setiap rancangan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta rencana produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan atau dipasarkan bank.

Selanjutnya, sosialisasi atas ketentuan terbaru menjadi poin penting dalam pelaksanaan budaya kepatuhan. Makin tinggi



pemahaman atas ketentuan dari seluruh divisi/biro/grup membuat tingkat kepatuhan PaninBank makin meningkat.

Terkait dengan kepengurusan di Perbanas, apa saja tugas dan fungsi yang dijalankan selama ini?

Saya termasuk pengurus Perbanas dengan menjadi anggota bidang hukum Perbanas. Tugasnya adalah melakukan kajian dan memberikan masukan/tanggapan kepada pengurus Perbanas dalam rangka menciptakan organisasi/perkumpulan yang tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mendampingi dan/atau mewakili pengurus Perbanas di dalam rangka menyampaikan kajian, masukan/tanggapan kepada otoritas dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Tugas tersebut sudah dijalankan dan diimplementasikan dengan baik oleh anggota di bidang hukum Perbanas.

Selain itu, apa saja yang telah Anda lakukan sebagai pengurus di Perbanas?

Dengan pengalaman di bidang perbankan selama lebih kurang 25 tahun, khususnya di bidang kepatuhan dan hukum, sebagai direktur kepatuhan saya cukup memiliki pemahaman terkait dengan bidang hukum dari segi peraturan maupun praktik yang berlaku di perbankan.

Dari pengalaman tersebut, saya turut aktif berkontribusi di Perbanas. Salah satunya dengan berpartisipasi sebagai pembicara/pemateri dalam *workshop/seminar* yang diadakan Perbanas, asosiasi, ikatan profesi maupun lembaga pemerintah. Saya juga aktif dan hadir dalam acara yang diadakan oleh regulator dan Perbanas serta memberikan masukan kepada anggota Perbanas dalam forum diskusi ataupun dengar pendapat yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang berkembang. ■

Perbanas Sumut Berbagi Kasih

Natal 2017 dirayakan Perbanas Sumut dengan menggelar bakti sosial. Bantuan yang diberikan Perbanas Sumut kepada anak-anak merupakan wujud kasih pelaku industri perbankan kepada mereka dan sebagai upaya mendorong semangat dalam belajar.

Mengawali Desember 2017, suka cita Natal 2017 sudah dirasakan Perbanas Sumatera Utara (Sumut). Organisasi yang menaungi industri perbankan di Provinsi Sumut ini memaknai Natal 2017 dengan menggelar bakti sosial (baksos). Kegiatan yang diselenggarakan pada 12 Desember 2017 itu diisi dengan kunjungan ke Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rogate dan Yayasan Panti Asuhan Kasih Nurani Indonesia.

Pengurus Perbanas Sumut yang ikut dalam kegiatan baksos ini adalah Thomas Cipta Kusuma, wakil ketua; Lie Cian, bendahara; Joelina David, wakil sekretaris; Wong Fong Lan, ketua bidang pendidikan dan sumber daya manusia (SDM); Ana Sjamsuriah, ketua bidang olahraga dan rekreasi; dan Denny Muljono, ketua bidang

humas dan organisasi. Menurut Thomas, kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin Perbanas Sumut saat memperingati hari besar keagamaan.

Dalam kunjungan ke HKBP Rogate yang terletak di Jalan Gaperta Ujung Gang Beringin, Medan, rombongan Perbanas Sumut diterima Pendeta Tinorva Hutabalian. Di sini Perbanas Sumut menyerahkan bingkisan yang berisi tas, buku, alat tulis, dan uang saku kepada 50 siswa Sekolah Minggu HKBP Rogate yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Bingkisan yang sama juga diberikan kepada 68 penghuni Yayasan Panti Asuhan Kasih Nurani Indonesia. Panti asuhan yang dipimpin Joni Zebua ini terletak di Jalan Pengabdian Nomor 20, Laut Dendang, Deli Serdang.

Selain berbagi suka cita menyambut Natal dan Tahun Baru 2018, Perbanas Sumut berharap bingkisan yang disampaikan kepada anak-anak tadi dapat mendorong semangat anak-anak dalam menuntut ilmu dan menggapai masa depan yang lebih baik. ■



Bakti Sosial Perbanas Jateng

Semangat perayaan Natal 2017 sudah dirasakan anggota Perbanas Jawa Tengah (Jateng) sejak November 2017. Merayakan kelahiran Yesus Kristus ini, Perbanas Jateng menyelenggarakan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada Sekolah Dasar (SD) Kanisius yang terletak di Jalan Pusponjolo, Semarang, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pangudi Luhur (PL) Bonifasio di Jalan Muktiharjo Dalam 7, Semarang, pada 23 November 2017.

Beberapa pengurus Perbanas Jateng ikut serta dalam bakti sosial ini. Mereka adalah Hendra Sutanto (Bank Central Asia), Soesianti (Shinhan Bank Indonesia), Monika (Bank Mayapada), Hana (PermataBank), Joeli Koeswardani (Bank Negara Indonesia), Handayani (Bank Danamon), dan Nancy (Bank QNB Indonesia). ■



Perbanas Jateng dan Udinus Jalin Kerja Sama

Untuk memberikan informasi kepada pencari kerja yang berminat berkarier di sektor perbankan, Udinus bekerja sama dengan Perbanas Jateng menyelenggarakan *job fair*. Selain mendapat informasi lowongan pekerjaan, para pencari kerja juga bisa berkonsultasi mengenai dunia kerja di sektor perbankan.

Sebagai sektor yang sangat strategis, sektor perbankan masih banyak dilirik para pencari kerja sekarang ini. Namun, perubahan arah ekonomi pada zaman modern saat ini tentunya juga berpengaruh pada arah pergerakan industri perbankan. Konsekuensinya, sumber daya manusia (SDM) yang akan memasuki sektor ini pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Hal ini harus diketahui para pencari kerja, terutama mereka yang baru lulus perguruan tinggi.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) bekerja sama dengan Perbanas Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan *job fair* pada 9-10 Desember 2017. Acara yang diselenggarakan di Gedung E, lantai 3, Kampus Udinus, Semarang, ini merupakan *job fair* ke-19 yang digagas oleh Udinus Career Center (UCC). *Job fair* yang dibuka untuk masyarakat umum ini juga bertujuan untuk memfasilitasi 742 lulusan Udinus yang baru saja diwisuda.

Sebanyak 14 bank pemerintah dan swasta anggota Perbanas Jateng berpartisipasi dalam ajang ini. Sesuai dengan misi kerja sama Udinus dengan Perbanas Jateng, menurut

Andik Setyono, Ph.D., Kepala UCC, lowongan yang ditawarkan dalam *job fair* kali ini khusus untuk sektor perbankan. Sebagian besar lowongan yang ditawarkan adalah bidang teknologi informasi (TI). “Hal ini sesuai dengan latar belakang Udinus yang berbasis IT. Posisi lainnya yang ditawarkan kepada *job seeker* dalam ajang ini ialah *marketing*, *customer service*, dan *teller*,” terangnya.

Agus Triyono, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Udinus, menambahkan, selain informasi lowongan pekerjaan, *job fair* menyediakan konseling karier. Forum yang menghadirkan praktisi perbankan Jateng ini memberikan gambaran dunia kerja di sektor perbankan dan memotivasi mereka yang tertarik bergabung di sektor ini. Beberapa bank juga membuka kesempatan interviu langsung kepada para pencari kerja. *Job fair* ini merupakan agenda rutin Udinus yang diselenggarakan setelah perguruan tinggi tersebut mewisuda lulusannya. Forum ini menjadi bagian tanggung jawab Udinus mempersiapkan karier bagi lulusannya. ■



Sehat dan Solid Ala Perbanas Sulut

Perbanas Sulut menyelenggarakan *gathering*, yang diisi dengan beragam kegiatan yang menyehatkan badan. Acara tersebut sebagai ajang mempererat jalinan antarpelaku bisnis perbankan di Sulut.



Rutinitas pekerjaan sehari-hari perlu diselingi dengan kegiatan yang mendukung kesehatan jiwa dan raga. Hal itu sangat dipahami pengurus serta anggota Perbanas Sulawesi Utara (Sulut). Di sela-sela kesibukannya mengelola bisnis bank, asosiasi perbankan Sulut ini pun menyempatkan untuk menyelenggarakan *gathering*. Acara tersebut mendapat tanggapan positif dari karyawan bank anggota Perbanas Sulut.

Sebanyak 300-an karyawan bank di Manado, Sulut, berkumpul di Lapangan Megamas, Manado, pada 2 Desember 2017 dalam acara “Gathering Perbanas

Sulut”. Ada sekitar 18 bank di Manado yang mendukung acara *gathering* ini. Sebut saja Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Maybank Indonesia, HSBC, Nobu Bank, Bank Bukopin, PaninBank, Bank Central Asia (BCA), dan PermataBank.

Gathering diawali dengan jalan sehat dan selanjutnya diisi dengan senam zumba. Kegiatan ini tak hanya bermanfaat untuk kesehatan raga, tapi juga jiwa. Relaksasi sangat dibutuhkan profesional perbankan yang setiap hari disibukkan dengan aktivitas di kantor. Agenda tahunan ini menurut Merlin Maya Lumangkun, Ketua Perbanas Sulut, bisa menjadi momen untuk mempererat jalinan antarinsan perbankan Sulut. “Dengan berolahraga bersama, kita bisa sehat, solid, dan produktif,” katanya.

Keterlibatan karyawan bank di acara ini sangat diapresiasi Steward Khotania, Koordinator Olahraga dan Kesenian Perbanas Sulut, yang juga Pimpinan Bank Mayapada Manado. “Dengan begini, kita bisa saling kenal dan memupuk rasa kebersamaan,” ujarnya. Acara *gathering* ditutup dengan pembagian *door prize* untuk para peserta *gathering*. ■



PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

**PENGURUS
DAN ANGGOTA PERBANAS**

Mengucapkan

**Selamat Natal 2017
dan Tahun Baru 2018**

